



BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Lingkungan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas di dalam studi ilmu hubungan internasional. Dampak buruk yang terjadi pada lingkungan akibat aktivitas terkhususnya aktivitas yang terjadi akibat ekonomi manusia, hal itu menjadi salah satu tantangan bagi studi hubungan internasional dan juga menjadi tantangan bagi studi hubungan internasional untuk menjawab persoalan ini dengan menggeser obyek studinya dari militer tradisional hingga fokus pada keamanan manusia (Sayyidati, 2017).

Lingkungan merupakan tempat tinggal manusia, bahkan manusia adalah lingkungan itu sendiri. Lingkungan termasuk makhluk hidup lainnya juga seperti flora, fauna dan lainnya sehingga pentingnya bagi kita menjaga lingkungan kita karena manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa alam dan lingkungan yang tidak baik. Lingkungan hidup itu berguna bagi manusia sebagai tempat bertahan hidup, tempat manusia untuk menyokong kehidupannya sehingga selama hidup manusia itu berlangsung sehingga hal ini membuat lingkungan itu merupakan komponen penting dan manusia antara lingkungan memiliki hubungan timbal balik (Gule, Limbong, Tarigan, & Tarigan, 2023).

Pemahaman masyarakat untuk menjaga lingkungan harus lebih di tanamkan lagi sejak dini karena nyatanya lingkungan yang kita tempati semakin rusak dikarenakan ulah manusia itu sendiri. Dampak kerusakan lingkungan itu sendiri juga sampai ke manusia itu sendiri, namun tetap saja masih banyak manusia yang tidak peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak lingkungan yang buruk tidak hanya merugikan banyak masyarakat sekitarnya, namun juga negara. Lingkungan yang buruk bagi negara dapat berdampak di berbagai aspek dan hal. Ekonomi, flora dan fauna yang



punah, penyakit bagi masyarakat, dan masih banyak lagi sehingga hal ini menjadi permasalahan nasional maupun internasional. Terjadi permasalahan pada lingkungan adalah sebagai akibat dari meningkatnya penggunaan bahan kimia yang terjadi pada saat ini yang mengancam kehidupan di dunia.

Menjaga lingkungan juga menjadi modal bagi setiap manusia dan negara, modal alam memberikan kontribusi yang amat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan manusia. Istilah modal alam ini mencakup beberapa fungsi penampung seperti udara dan air, hutan – hutan, air laut yang menjadi penampung dari polusi – polusi seperti polusi yang ditimbulkan oleh limbah industri, kendaraan bermotor, alat – alat rumah tangga dan lain sebagainya (Firmansyah & Gunawan, 2007). Indonesia sendiri sudah melakukan banyak cara dan kebijakan untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan demi generasi selanjutnya. Hal ini juga sebagaimana mestinya dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengarah ke politik hukum negara dalam melaksanakan pembangunan negara berdasarkan beberapa prinsip yang menjaga keseimbangan progresif dan kesatuan ekonomi nasional (Maulidyna, 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan kekayaan alam terbanyak, dan merupakan negara dengan hutan terbesar ketiga. Berdasarkan Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memantau bahwa pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan hutan Indonesia di Tahun 2019 adalah 94,1 juta hektar atau 50,1 persen dari total daratan (Najicha, Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan, 2021). Berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Lindung dan Hutan Produksi menjelaskan hutan lindung merupakan wilayah tertentu



yang ditetapkan oleh pemerintah keberadaannya sebagai hutan tetap. Fungsi hutan lindung juga sebagai perlindungan sistem kehidupan masyarakat dalam mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Najicha, Dampak Kebijakan Alih Fungsi Kawasan Hutan Lindung Menjadi Areal Pertambangan Berakibat Pada Degradasi Hutan, 2021). Isu lingkungan sendiri memunculkan aktor – aktor yang terlibat di dalamnya, yakni kelompok epistemik, gerakan sosial, pemerintah, dan organisasi – organisasi internasional dan isu lingkungan sendiri menekankan pada kegiatan ilmu pengetahuan yang bersifat non – pemerintah karena isu lingkungan dibentuk di luar area politik oleh ilmuwan dan institusi penelitian yang menunjukkan permasalahan yang muncul dan dapat mengancam kelangsungan hidup manusia (Sayyidati, 2017).`

Tidak hanya negara, organisasi internasional yang berfokus kepada lingkungan seperti *World Wildlife Fund* (WWF), organisasi internasional yang mendukung perlindungan dan kelestarian kepada keanekaragaman hayati yang terancam punah (Ramadhanty , 2018). Salah satu program yang dibuar oleh WWF adalah “*Heart of Borneo*” atau Jantung Kalimantan karena di Indonesia sendiri terkenal dengan alamnya yang melimpah dan sebagai salah satu paru – paru dunia yang terletak di Kalimantan. Program WWF “*Heart of Borneo*” merupakan inisiatif dari WWF dan tiga negara yang terletak di Kalimantan yaitu Indonesia, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan tujuan untuk menangani deforestasi hutan hujan Kalimantan yang merupakan hutan hujan paling penting di Dunia (Firmansyah, Purnomo, Kasiwi, & Sadayi, 2021). Di Indonesia sendiri penggundulan hutan sendiri terjadi di tingkat yang sangat mengkhawatirkan, terkhususnya di kota – kota besar seperti Jakarta. Deforestasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya akan berdampak kepada Indonesia saja namun lingkungan secara global (Firmansyah, Purnomo, Kasiwi, & Sadayi, 2021).



Penulis mengambil judul Peran Indonesia dalam Melestarikan Hutan Lindung Mahulumele melalui Program WWF “*Heart of Borneo*” di Kalimantan Timur karena penulis merasa bahwa lingkungan merupakan hal yang mendesak untuk di bahas pada saat ini. Masuknya WWF ke Indonesia dengan adanya *Heart of Borneo* merupakan salah satu contoh *Transnational Advocacy Network* karena para aktor tidak hanya berfokus kepada negara namun juga beberapa unsur dan isu yang hangat untuk mengajak masyarakat membahas dan menjadi bagian dari program tersebut (Firmansyah, Purnomo, Kasiwi, & Sadayi, 2021). Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa penulis menjadikan hal ini alasan untuk membahas topik tersebut sebagai bentuk partisipasi penulis sebagai masyarakat akan pentingnya kesadaran dalam kondisi lingkungan tempat kita tinggal. Pengelolaan wilayah *Heart of Borneo* ini meliputi cagar alam, taman nasional, taman rekreasi dan hutan raya salah satunya dan program ini merupakan program berkelanjutan yang diawali pada tahun 2007. Dan identifikasi beberapa isu terkait program *Heart of Borneo* adalah yang pertama pentingnya kawasan *Heart of Borneo*, kedua adalah pencapaian *Heart of Borneo initiative* yang masih timpang antara ketiga negara dan yang ketiga adalah arti penting *Heart of Borneo initiative* bagi Indonesia (Suni & Rohilie, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Heart of Borneo dan Upaya Penjagaan Kelestarian Hutan di Kalimantan Barat, 2021).

Hutan Mahakam Ulu atau biasanya di sebut Hutan Mahulu ini terletak di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur dengan luas wilayah sebesar 15.315 hektare. Hampir 80% dari wilayah Kabupaten Mahulu merupakan kawasan hutan tropis dan luas wilayah hutan ini sebesar 706.523 hektare. Bonifasius Belawan Geh selaku bupati Mahakam Ulu mengatakan bahwa kawasan lindung ini merupakan wilayah yang memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian alam. Dan karena titik strategisnya hutan tropis ini mendapat julukan sebagai jantung borneo (Rani K. T., 2024).



Seperti yang di sebut sebelumnya, topik lingkungan sangat menarik perhatian masyarakat global hal itu membuat banyaknya pihak yang ikut mengambil peran dan pihak – pihak inilah yang memunculkan tema degradasi lingkungan sebagai suatu ancaman bagi kehidupan manusia lalu diharapkan masyarakat internasional bisa melakukan langkah nyata untuk mengatasi problem lingkungan yang ada atau yang sekarang dikenal sebagai usaha sekuritisasi lingkungan (Sayyidati, 2017). Sekuritisasi lingkungan adalah upaya menjaga atau mempertahankan lingkungan lokal dan biosfer yang di Bumi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa isu lingkungan ini juga menekankan pada kegiatan ilmu pengetahuan dan bersifat non – pemerintah, namun isu lingkungan mempunyai agenda yang berisikan proses pengambilan keputusan dan kebijakan – kebijakan yang melibatkan politik. Jadi pada isu lingkungan atau dalam sekuritisasi lingkungan, para pemeran – pemeran mempunyai perannya sendiri. Para ilmuan mengemukakan ancaman yang ada dalam suatu masalah lingkungan, kemudian peran politik memunculkan perhatian publik dan juga mencari cara untuk mengatasi isu lingkungan yang ada (Sayyidati, 2017).

Hal ini juga didukung oleh upaya – upaya yang dilakukan oleh WWF, Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam program kerja sama ”*Heart of Borneo*” dan peran masing – masing negara atau organisasi yang terlibat kepada masyarakat sekitar kawasan atau yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bagaimana para aktor dari program kerja sama ”*Heart of Borneo*” ini membawa masyarakat sekitar berperan dalam kelangsungan implementasi dari program kerja sama ini. Masyarakat tidak hanya ikut serta, namun juga diberikan pemahaman dan membantu masyarakat lewat advokasi yang diberikan oleh WWF, Indonesia, dan Brunei Darussalam.

1.2 Batasan Masalah



Dalam penulisan ini, penulis menetapkan batasan masalah pada bagaimana perannya Indonesia dalam program “*Heart of Borneo*” di Hutan Kabupaten Mahulu. Penulisan ini juga akan berfokus pada implementasi dan dampak yang ditimbulkan oleh program kerja sama pada kawasan Hutan Mahulu, Kalimantan.

Program kerja sama *Heart of Borneo* ini juga telah berjalan sejak tahun 2007, namun penulis akan memfokuskan penulisan ini dengan rentan waktu sejak tahun 2020 – 2024. Penulis memilih rentang tahun tersebut dikarenakan program ini sudah berjalan sejak cukup lama, dan penulis memilih rentang tahun tersebut agar pembahasan lebih relevan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari topik yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut,

- a. Bagaimanakah peran Indonesia terhadap implementasi kerja sama Indonesia, WWF kepada Hutan Mahulu melalui program kerja sama *Heart of Borneo*?
- b. Bagaimanakah dampak yang ditimbulkan dari program kerja sama “*Heart of Borneo*” pada kawasan Hutan Mahulu dan sekitarnya?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari topik yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut,

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dari implementasi program kerja sama Indonesia “*Heart of Borneo*” di kawasan Hutan Mahulu, Kalimantan Timur.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari Program “*Heart of Borneo*” di Hutan Mahulu, Kalimantan Timur.



5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para akademisi terkait Peran Indonesia dalam Program Kerja Sama “*Heart of Borneo*” di Kawasan Hutan Mahulu.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gagasan dalam ilmu pengetahuan terkhusus bagi pengkaji Studi Ilmu Hubungan Internasional serta membantu dalam pemahaman bagaimana Program Kerja Sama “*Heart of Borneo*” di Kawasan Hutan Mahulu.

b. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam peningkatan pemahaman secara publik terhadap akar masalah, implikasi program dan kerja sama internasional terkait upaya yang di implementasikan bagi lingkungan, khususnya hutan di Indonesia.

1.6 Kerangka Konseptual

a. Kerja Sama Internasional (*International Cooperation*)

Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kerja sama internasional. Konsep kerja sama internasional menurut Robert O Keohane dan Nye menjelaskan bahwa hubungan transnasional berkaitan dengan rasa interdependensi pentingnya dan peran institusi internasional dalam masalah internasional maupun nasional (Kusnadi, Aprilya, Dea Ayu, Durrotunnisa, & Dinasty, 2022). Juga menurut K.J Holsti kerja sama internasional adalah pandangan yang melibatkan dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu untuk menghasilkan sesuatu, dipromosikan, atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. Menurut K.J



Holsti juga menyatakan ada beberapa faktor dalam kerja sama internasional antara lain,

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan minimalnya biaya dan keterbatasan produksi untuk kebutuhan masyarakat.
- b. Efisiensi penggunaan biaya dan ancaman keamanan bersama.
- c. Minimalisir kerugian setiap tindakan satu negara yang kemudian berdampak kepada negara lainnya.

Kerja sama internasional juga berperan penting dalam hubungan internasional karena hubungan internasional mempunyai pelibatan interaksi yang kompleks antar negara, karena mengingat lagi bahwa negara merupakan salah satu aktor utama dalam hubungan internasional. Hubungan internasional juga merupakan interaksi antara unit atau lebih. Tujuan dari hubungan internasional juga mencakup perdamaian dan keamanan internasional. Hal – hal yang ditunjukkan oleh studi hubungan internasional ini dicapai dengan beberapa cara salah satunya dengan kerja sama. Kerja sama dapat terjadi antar negara, negara dengan organisasi atau pun antar individu dan menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan dalam kerja sama internasional.

Dalam program kerja sama antar Indonesia WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia, dan Brunei Darussalam merupakan salah satu bentuk dari kerja sama internasional. Program “*Heart of Borneo*” ini melibatkan negara lebih dari satu dan organisasi internasional dengan tujuan yang sama yaitu Indonesia, WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia dan Brunei Darussalam. Program “*Heart of Borneo*” ini menjelaskan bahwa hilangnya alam mengharuskan organisasi seperti mereka untuk berpikir dan bertindak lebih besar serta bekerja sama lebih dari sebelumnya (Newby



, 2024) 23 Juni 2024 17.22 WITA. Hal tersebut membuat penulis meneliti program ini dengan menggunakan konsep kerja sama internasional.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*The Sustainable Development Goals/SDG's*)

Topik lingkungan menjadi salah satu tantangan dalam hubungan internasional. Teori hijau di dasarkan pada pemikiran ekologis, mementingkan kepentingan alam itu sendiri, tidak hanya manusia terhadap alam. Dan teori hijau merupakan teori yang menangkap bahwa lingkungan ini ada hubungannya dengan agensi politik dan juga teori ini mengarah kepada isu lingkungan. Teori hijau muncul pada akhir 1980-an untuk menyuarakan keprihatinan gerakan – gerakan sosial yang baru seperti lingkungan hidup, perdamaian, anti – nuklir, perempuan (Taqwadin). Munculnya teori hijau juga dampak dari akibat aktivitas manusia yang mempunyai sejarah yang panjang dan kompleks, dan masa ekspansi global dan revolusi industri. Semakin banyak bukti bahwa tindakan manusia yang mengubah lingkungan di dunia, hubungan internasional pada tahun 1900-an mulai mengakui bahwa alam sebagai sumber pertanyaan yang semakin signifikan bagi studi hubungan internasional (Dyer, *Introducing Green Theory in International Relations*, 2018).

Dyer juga mengatakan bahwa Goodin mengemukakan bahwa teori hijau memiliki ciri khas dengan visi moral yaitu ada pembatasan dalam pengembangan materi manusia ini dilakukan demi melestarikan langsungnya kehidupan (Dyer, *Introducing Green Theory in International Relations*, 2018). Dalam teori hijau lingkungan hidup merupakan aspek yang penting sebagai topik utama. R. Eckersley menjelaskan teori hijau dalam kerangka ekosentrisme yang menolak pandangan yang berpusat pada manusia (Najia & Triyatno , *Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kehidupan Darat*



Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-2029, 2022). Ekosentrisme mempunyai nilai etika agar manusia tidak lagi bertindak sesuai keinginannya namun bertindak baik yang berhubungan dengan lingkungannya (Najia & Triyatno , Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kehidupan Darat Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-2029, 2022).

Eratnya teori hijau ini dengan lingkungan membuat teori hijau ini berkaitan dengan topik yang akan diteliti yaitu program ”*Heart of Borneo*”. Program WWF ini untuk melestarikan hutan di Pulau Kalimantan untuk menangani deforestasi di Kalimantan yang menjadi salah satu hutan terpenting di dunia (Firmansyah, Purnomo, Kasiwi, & Sadayi, 2021). Hutan di Pulau Kalimantan ini juga berperan penting dalam lingkungan sekitarnya bahkan makhluk yang hidup di dalamnya termasuk flora dan fauna. Dan maka dari itu penulis sendiri menggunakan teori hijau untuk penelitian ini. Hal ini juga diikuti dari manfaat hutan itu sendiri dan dampaknya bagi berlangsungnya kebaikan lingkungan kita sendiri. Teori hijau dalam hubungan internasional juga mengalami perkembangan sehingga diakui dimensi baru yang signifikan dalam teori hubungan internasional. Penekanan teori hijau seperti keadilan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, modernisasi reflektif dan keamanan ekologi (Taqwadin). Teori hijau mengalami teori turunan dalam kajian ilmu hubungan internasional yang berfokus pada isu – isu lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Beberapa turunan teori tersebut salah satunya ada, *The Sustainable Development Goals* (SDG’s) yang menjadi fokus pada penulis untuk penelitian ini. Hal ini seperti yang sudah disebut sebelumnya, bahwa dalam Inisiatif *Heart of Borneo* WWF juga menyatakan bahwa pemerintah Brunei Darussalam, Malaysia



dan Indonesia menandatangani sebuah deklarasi untuk melindungi kawasan hutan ini secara berkelanjutan. SGD merupakan agenda yang didirikan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan antara lain,

No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnerships for the goals (Katila, et al., 2020).

Pembangunan berkelanjutan menurut Sumarwoto adalah ketergantungan sosial ekonomi terhadap ekologi namun tidak menimbulkan efek negatif bagi sosial masyarakat maupun lingkungan itu sendiri (Herdiansyah, 2019). Dan bisa dibilang pengelolaan sumber daya berkelanjutan membutuhkan perencanaan, pola pembangunan, dan kebijakan. Program kerjasama ”*Heart of Borneo*” ini merupakan salah contoh program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. WWF menyatakan bahwa program “*Heart of Borneo*” merupakan sebuah komitmen bersejarah bagi visi mereka yang berupaya untuk mencapai kawasan budidaya berkelanjutan. Dalam Inisiatif *Heart of Borneo* WWF juga menyatakan bahwa pemerintah Brunei Darussalam, Malaysia dan Indonesia menandatangani sebuah deklarasi untuk melindungi kawasan hutan ini secara berkelanjutan. Penulis juga memfokuskan konsep tujuan pembangunan berkelanjutan pada goals 15 yaitu *Life on Land* untuk penelitian ini.

c. Lembaga Swadaya Masyarakat (*Non – Governmental Organizations/ NGOs*)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau biasa disebut sebagai Organisasi Non – Pemerintah (ORNOP) atau juga secara internasional sebagai *Non –*



Governmental Organizations (NGOs) merupakan organisasi yang independen yang didirikan untuk tujuan tertentu. Menurut Lewis NGOs merupakan kelompok sukarela yang bersifat nirlaba dan diorganisasikan secara lokal, nasional, ataupun internasional. Dan sekarang NGOs diakui sebagai aktor utama dalam pembangunan, hak asasi manusia, aksi kemanusiaan, lingkungan, dan area lainnya dalam aksi publik. Di Indonesia NGOs di bagi menjadi ke tiga kutub yang pertama adalah NGOs sebagai agen neoliberalisme yang dibentuk untuk menggantikan fungsi lembaga – lembaga sosial negara. Yang kedua, NGOs yang di danai oleh institusi swasta yang berwatak sosial demokrat. Dan yang ketiga adalah NGOs progresif yang sering terlibat dalam gerakan rakyat dan relatif memiliki independensi terhadap donor (Rizky, 2017). Keberadaan NGOs sekarang tidak dapat dipungkiri berjumlah sangat banyak, dan tidak bisa diremehkan khususnya dalam konteks hubungan internasional dan hal ini membuat peran NGOs semakin signifikan dalam dunia internasional. Menurut Edwards pada tahun 2000 menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan NGOs yang pertama penurunan kepercayaan bahwa liberalisasi pasar dan perdagangan bebas adalah satu – satunya cara dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Kedua, operasi NGOs cenderung *cost – effective* yang menjadikan NGOs ini sebagai partner yang ideal bagi negara ataupun korporasi untuk menangani isu yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, adanya penurunan kepercayaan atas pemerintah ataupun sektor privat. Namun terlepas dari perannya NGOs yang semakin signifikan, definisi NGO masih menjadi sebuah perdebatan (Albertus, 2015).

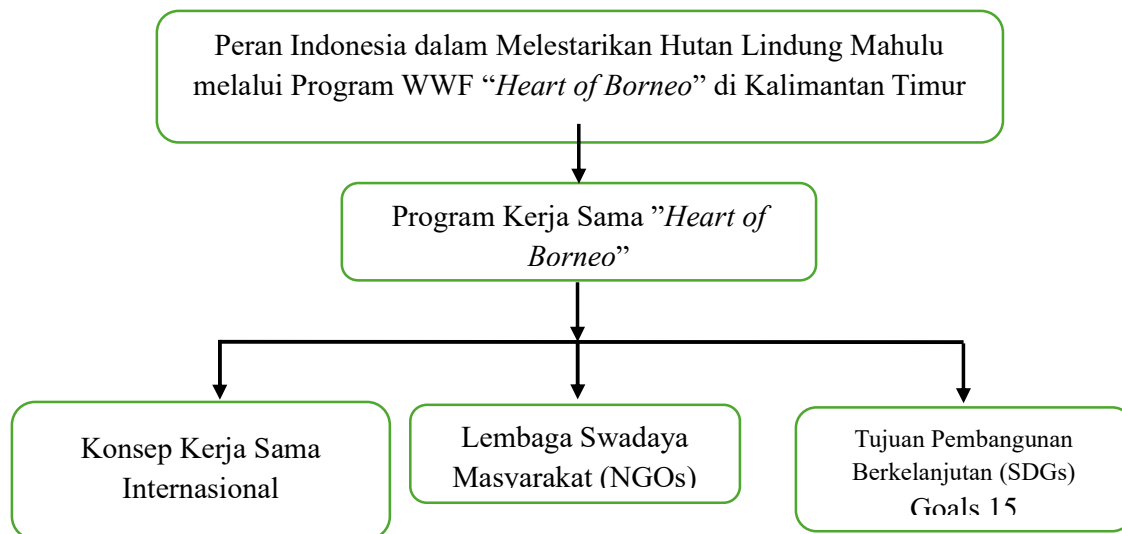
Konsep ini diambil oleh penulis dengan mengingat bahwa *World Wildlife Fund* (WWF) merupakan salah satu bentuk dari NGOs. Munculnya konstruktivisme

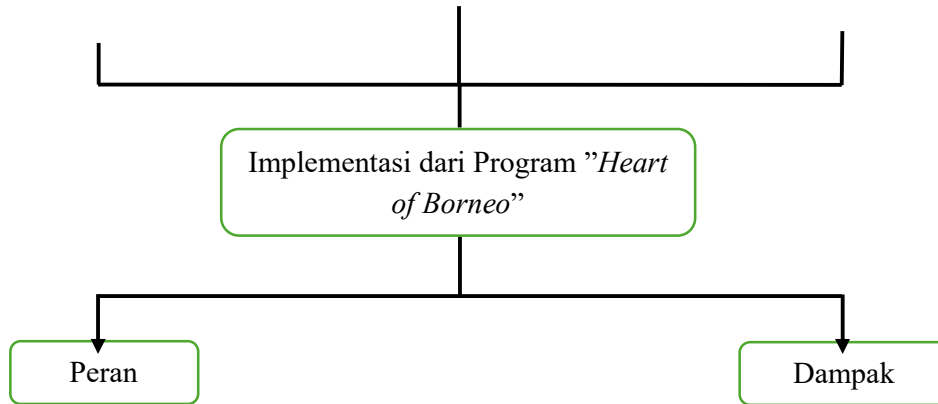


dalam hubungan internasional membuat aktor non negara ini menjadi penting dalam kebijakan dalam maupun luar negeri (Burlinova, 2022). Dengan konsep ini juga penulis akan menggunakan NGOs untuk menganalisis peran WWF dalam program kerja sama “*Heart of Borneo*” dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh WWF dalam melestarikan hutan – hutan mereka khususnya dalam program kerja sama ”*Heart of Borneo*”.

1.7 Skema Kerangka Konsep

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Kerja Sama Internasional, *Sustainable Development Goals* (SDG’s) dan *Non-Governmental Organization*.





Bagan 1 Kerangka Konseptual

Sumber : Diambil dari berbagai sumber

Berdasarkan kerangka konsep di atas, program kerja sama "*Heart of Borneo*" akan di analisis menggunakan konsep kerja sama internasional menganalisis kerja sama Indonesia, WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia dan Brunei Darussalam. *Sustainable Development Goals* (SDG's) digunakan untuk menganalisis program kerja sama antar Indonesia, WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia dan Brunei Darussalam yaitu "*Heart of Borneo*" dan juga *Non-Governmental Organisation* (NGOs). Dan analisis tersebut diharapkan dapat memberikan penjelasan dalam peran Indonesia dalam kerja sama program tersebut dan juga dampak dari kerja sama tersebut.

1.8 Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yaitu penelitian ini menjelaskan bagaimana peran Indonesia dalam program kerja sama "*Heart of Borneo*" bersama WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan selain itu, bagaimana dampak dari peran Indonesia dari kerja sama ini.

b. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau literaturereview. Dalam studi hubungan internasional studi pustaka merujuk pada analisis dan tinjauan literatur yang relevan dengan topik yang dibawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data dengan mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian penulis. Sumber – sumber ini diambil dari perpustakaan, basis data akademik, perpustakaan digital, portal berita dan website resmi yang kredibel.

c. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan studi data sekunder. Studi pustaka yang gunakan dalam penelitian ini merupakan sumber – sumber literatur yang relevan dengan topik yang di bahas oleh penulis seperti artikel, jurnal, dan artikel website. Dalam studi hubungan internasional, merujuk pada analisis literatur untuk topik dan konsep, teori, kerangka kerja dan temuan – temuan dalam bidang ini.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah data deskriptif analitik. Penelitian ini mengambil dan menganalisis permasalahan yang ada sebelumnya sudah dipaparkan. Permasalahan tersebut dianalisis dengan data – data yang sudah diperoleh oleh penulis dan diolah sehingga membuat argumen yang baru.

e. Metode Penelitian

Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif yaitu penulis akan mengambil permasalahan umum dan menarik permasalahan tersebut secara khusus menggunakan teori – teori dalam studi hubungan internasional yang telah ada.



9 Sistematika Penulisan

Berikut merupakan sistematika penulisan yang di bagi ke dalam lima bab, adapun kerangka konsep tersebut adalah,

BAB I Pendahuluan: Dalam pendahuluan akan ada penjelasan mengenai latar belakang topik permasalahan, lalu batasan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep dan skema konsep, metodologi penelitian, dan terakhir dalam pendahuluan adalah sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Dalam tinjauan pustaka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai konsep dan teori yang akan digunakan sebagai dasar analisis. Dalam tinjauan pustaka juga akan memperdalam pemahaman konsep dan teori, lalu bagaimana teori dan konsep tersebut menganalisis topik. Konsep pertama adalah kerja sama internasional yang merujuk pada pembahasan kerja sama antara Indonesia, WWF (*World Wildlife Fund*), Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam program “*Heart of Borneo*”. Yang kedua, adalah *Sustainable Development Goals* (SDG’s) yang merujuk pada tujuan dari program kerja sama ini dalam merawat hutan Kalimantan demi lingkungan sekitar, juga fauna. Dengan memahami konsep tersebut juga, pembahasan akan dibawa ke dalam gambaran dalam peran Indonesia dalam kerja sama ini, selain itu dampak dan implementasi dari perogram kerja sama ini. Dan konsep yang ketiga adalah *Non – Governmental Organisation* (NGOs) yang digunakan untuk menganalisis peran dari kerja sama WWF di program “*Heart of Borneo*”.

BAB III Gambaran Umum: Pada bagian gambaran umum akan menjelaskan topik permasalahan. Lebih tepatnya, bagaimana implementasi dan peran Indonesia di program kerja WWF (*World Wildlife Fund*).



BAB IV Analisis dan Hasil Penelitian: Pada bagian analisis berisikan analisis topik dan hasil analisis yang di proses melalui konsep, pengujian hipotesis dari data – data yang telah dikumpulkan.

BAB V Kesimpulan: Pada bagian kesimpulan akan berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang di tetapkan.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

1 *Kerja sama Internasional* (International Cooperation)

Teori kerja sama internasional ini berfokus pada studi yang mengenai penyebab konflik dan kondisi – kondisi yang membuat terjadinya kerja sama. Holsti mendefinisikan kerja sama internasional ke beberapa penjelasan antara lain sebagai berikut,

- a. Bahwa ada dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu yang dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari aktor bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai – nilainya.
- c. Perjanjian atau masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk mengambil keuntungan dari kepentingan yang sama atau konflik kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Wardani & Budiawan, 2021).

Kerja sama internasional juga merupakan hubungan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih oleh negara merdeka (Sardjono, Meilina, Saragih, & Prasetyo, 2021). Kerja sama internasional juga bisa diartikan sebagai bentuk kerja sama suatu negara dengan negara lain dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat di dunia. Kerja sama internasional meliputi kerja sama di bidang



politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi (Bagaskara, 2018). Hal ini juga bisa menjadi salah satu alasan munculnya kerja sama yaitu karena kerja sama awalnya karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga pemerintah saling melakukan usulan penanggulangan masalah, melakukan tawar – menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti – bukti teknis dan mengakhiri perundingan tersebut dengan suatu keputusan dan perjanjian atau pengertian yang dapat memuaskan semua pihak. Kerja sama internasional juga bisa disebut sebagai interaksi antara aktor hubungan internasional yang terdapat kepentingan negara di dalamnya, juga konflik dan perang hal kerja sama internasional antar aktor hubungan internasional semakin erat pasca perang dingin.

Munculnya kerja sama internasional di Studi hubungan internasional itu sudah lama. Munculnya hubungan internasional secara tidak langsung melahirkan konsep kerja sama internasional sendiri. Sejarah hubungan internasional ini mencakup bagai peristiwa. Hubungan internasional sendiri pada awal era awalnya mempelajari hubungan antar bangsa dan negara merupakan pelaku atau aktor utama dalam studi hubungan internasional (Setiawan, 2020). Dari hal tersebut membuat hubungan antara kerja sama internasional dengan hubungan internasional sangat sulit untuk dipisahkan perkembangan hubungan internasional membuat kerja sama internasional semakin meningkat hal ini menjadikan perdebatan keberadaan teori – teori dan konsep – konsep pada studi hubungan internasional.

Hubungan internasional sejak perang dunia II dianggap mendukung asumsi aliran realis tentang situasi yang anarki dan serba konflik. Sehingga sejak tahun 1960 – 1990 hubungan internasional ditandai oleh perang dingin dan perlombaan senjata oleh Amerika Serikat dengan Uni Soviet dan sampai berakhirnya perang dingin tersebut tetap masih saja terjadi dan artinya di tengah situasi yang banyak konflik, upaya untuk



menciptakan kerja sama internasional masih tetap berjalan (Mugasejati, 2006). Pandangan realisme pada hubungan internasional merupakan pandangan yang selalu mendasarkan pandangan mereka pada realitas, bukan pada apa yang seharusnya seperti yang di klaim oleh kaum idealisme (Asrudin, 2014). Realisme sendiri merupakan salah satu paradigma paling besar di dalam studi Hubungan Internasional. Paradigma sendiri adalah sebuah istilah yang pertama kali digunakan oleh Kuhn di *The Structure of Scientific Revolution* yaitu pada dasarnya realitas sosial itu dikonstruksi oleh *mode of thought* atau *mode of inquiry* tertentu, yang pada gilirannya akan menghasilkan *mode of knowing* tertentu pula. Realis juga beranggapan bahwa prinsip – prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik negara (Asrudin, 2014). Bisa disimpulkan juga dari pernyataan di atas bahwa k erja sama internasional ini ada sejak dari awal hubungan internasional itu mulai muncul juga. Dan sejak pada saat itu juga kerja sama internasional mulai berkembang hingga sekarang yang di dengan kerja sama internasional itu sebagian besar negara di dunia berhasil bekerja sama dan mendirikan IMF, Bank Dunia, dan GATT dan juga banyak perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral (oleh dua negara) maupun multilateral (oleh banyak negara atau lebih 2 negara) dan juga semakin banyaknya lembaga atau organisasi internasional yang berkembang baik (Mugasejati, 2006). Kerja sama internasional biasanya terjadi secara bilateral, multilateral, dan regional. Kerja sama internasional secara bilateral biasanya terjadi dengan melibatkan dua negara (Ismira , Gitra, Khaldun, & Ismail, 2022). Kerja sama internasional secara multilateral merupakan kerja sama yang melibatkan lebih dari dua aktor hubungan internasional. Sedangkan kerja sama internasional regional merupakan kerja sama antar negara yang mempunyai satu kawasan yang sama.

Seiring berkembangnya kerja sama internasional bentuk – bentuk kerja sama internasional bermacam – macam karena mencakup isu yang luas cakupan isu



internasional selama perkembangan kerja sama internasional mulai dari perlindungan flora dan fauna, perlindungan tempat bersejarah, wisata. Ada pun juga dalam masalah – masalah ekonomi seperti perbankan, perdagangan, finansial, hingga sampai dengan isu politik dan keamanan seperti pembatasan senjata nuklir, perjanjian perdamaian, terorisme, diplomasi dan lain sebagainya (Mugasejati, 2006). Beberapa macam kerja sama internasional yang ada antara lain kerja sama politik, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial dan budaya, kerja sama ilmiah dan teknologi, kerja sama kesehatan, kerja sama militer, dan kerja sama lingkungan.

a. Politik

Kerja sama internasional politik ini merupakan kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas politik seperti keamanan dan perdamaian global. Salah satu sebagai contoh organisasi internasional yaitu Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). Kewenangan PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional (Tutkey, Lengkong, & Kasenda, 2021). PBB juga merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang banyak bekerja sama bahkan mengeluarkan kebijakan bersama dengan negara – negara di dunia dalam hal keamanan dan perdamaian.

b. Ekonomi

Kerja sama internasional di bidang ekonomi pada umumnya merupakan kerja sama yang dilakukan antar negara atau aktor non-negara untuk membantu negara – negara berkembang dan menciptakan tantangan ekonomi global juga kondisi yang baik bersama.



c. Sosial Budaya

Kerja sama internasional di bidang sosial dan budaya pada umumnya merupakan kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara untuk mempromosikan pemahaman toleransi, dan perkembangan dalam aspek sosial dalam bentuk budaya. Hal ini juga bisa menjadi salah satu bentuk negara-negara mempromosikan budayanya ke negara lain.

d. Ilmiah dan Teknologi

Dalam kerja sama internasional ilmiah dan teknologi, negara-negara berkolaborasi dengan tujuan untuk memajukan pengetahuan, inovasi dan teknologi di negara mereka.

e. Kesehatan

Dalam kerja sama internasional bidang kesehatan merupakan upaya negara – negara dalam meningkatkan kesehatan secara global dan mengatasi masalah kesehatan secara global, bahkan untuk meningkatkan sistem kesehatan dunia yang lebih baik.

f. Militer

Kerja sama internasional di bidang militer pada umumnya kolaborasi antar dua negara atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan negara, keamanan global, aliansi militer, bahkan latihan bersama. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga perdamaian dan mengatasi ancaman bersama.

g. Lingkungan

Kerja sama internasional di bidang lingkungan umumnya merupakan kerja sama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, atau dengan organisasi internasional yang berfokus kepada lingkungan dengan tujuan



untuk memperbaiki iklim global, kehancuran ekosistem, dan penanganan dalam penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.

Dapat dibilang juga bahwa kerja sama internasional ini dipengaruhi oleh kepemimpinan setiap negara. Sehingga kepemimpinan sangat berperan penting untuk mengambil setiap kebijakan dan keputusan yang di tetapkan di dalam kerja sama oleh setiap negara. Hal tersebut juga terkadang membuat kerja sama internasional ini mempengaruhi hubungan antar negara yang melakukan kerja sama, dan juga kerja sama mempengaruhi hubungan kedua atau lebih negara tersebut. Kerja sama internasional dalam studi hubungan internasional juga sering kali mendapatkan kritik karena cenderung mengabaikan dinamika kekuasaan asimetris antara negara – negara, yaitu teori ini cenderung untuk berasumsi bahwa semua negara yang terlibat dalam kerja sama memiliki kepentingan yang sama dan berada di posisi yang sama, padahal dalam praktiknya negara – negara yang mempunyai kekuatan ekonomi dan militer yang lebih cenderung mendominasi (Wade, 2010).

2.2 Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/) SDG's)

Pada tahun 1960an masyarakat mulai menyadari akan krisisnya kehidupan global pada saat itu dikarenakan “*tragedy of the commons*” yang di mana manusia menggunakan sumber daya alam seperti tanah, air bersih, dan ikan secara berlebihan. Sehingga pada tahun 1970an, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) melakukan konferensi pertama tentang hal ini mengenai isu lingkungan dan pada tahun 1980an partai politik yang ramah lingkungan muncul. Pada 1990an hal ini membuat studi hubungan internasional mulai menyadari bahwa lingkungan alam merupakan isu yang penting bagi hubungan internasional sehingga memerlukan perhatian teoritis dan praktis dan hal ini didukung oleh kenyataan bahwa semakin banyaknya bukti bahwa



tindakan manusia secara signifikan mengubah iklim global dan menimbulkan masalah keamanan dan keamanan yang ekologis (Dyer, Green Theory, 2017). Teori hijau yang membahas tentang isu lingkungan ini menunjukkan bahwa lingkungan mempunyai peran penting dalam sistem internasional sehingga perlu diketahui dan dikaji lebih dalam. Tantangan lingkungan di dunia internasional membuat studi hubungan internasional tidak hanya membahas negara, perang, dan politik semata (Najia & Triyatno , Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kehidupan Darat Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-1029, 2022).

Fokus kajian Teori Hijau ini berangkat dari isu lingkungan dan teori ini masih terbilang baru, munculnya teori ini ada pada tahun 1990an hingga sekarang. Perkembangan Teori Hijau ini juga diikuti oleh beberapa teori dan konsep turunan yang ada. Antara lain,

a. Karbon (*Carbonethics*)

Carbonethics merupakan satu lembaga yang bertujuan memulihkan keseimbangan iklim dalam konservasi karbon biru. *Carbonethics* juga memiliki kemiripan dengan Teori Hijau (*Green Theory*) yang melihat degradasi pada lingkungan sehingga perlu adanya pengambilan tindakan baik dalam upaya pemulihan, adaptasi, ataupun mitigasi (CarbonEthics, t.thn.)

b. Ekonomi Hijau (*Green Economy*)

Ekonomi hijau merupakan suatu metode pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang mengandalkan ekonomi berdasarkan sumber daya alam dan lingkungan. Definisi lain ekonomi hijau ini juga merupakan ekonomi dari dunia yang sesungguhnya, dunia dari pekerjaan, kebutuhan



manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana elemen tersebut digabungkan menjadi satu (Makmun).

Ekonomi hijau ini harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat untuk berbagai periode generasi dan diharapkan mampu mendukung tingkat konsumsi dan produksi yang berkelanjutan (Anwar, 2022).

c. Politik Hijau (*Green Politics*)

Eckersley mendefinisikan politik hijau adalah erkosentrisme sebuah penolakan terhadap pandangan hidup dunia antroposentris yang menempatkan nilai moral menuju pandangan yang juga menempatkan independen atas ekosistem (Rani F. , 2013). Begitu juga Goodin, ia menyatakan bahwa etika pusat pemikiran dari politik hijau adalah etika (Rani F. , 2013).

Politik hijau ini menganggap isu lingkungan sebagai isu utama dalam kajian hubungan internasional yang berangkat dari teori kritis seperti pemanasan global dan polusi (Najia & Triyanto, S.Sos., M.Si, Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kehidupan Daratan Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-2019, 2022).

d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SGDs*)

Pembangunan berkelanjutan menurut Sumarwoto adalah ketergantungan sosial ekonomi terhadap ekologi namun tidak menimbulkan efek negatif bagi sosial masyarakat maupun lingkungan itu sendiri (Herdiansyah, 2019). Dan bisa dibilang pengelolaan sumber daya



berkelanjutan membutuhkan perencanaan, pola pembangunan, dan kebijakan. SDGs ini pertama kali di umumkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 dengan moto “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” dan ada sekitar 193 negara yang menghadiri dan mengesahkan konsep SDGs ini, termasuk Indonesia yang pada saat itu Indonesia di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla (Najia & Triyanto, S.Sos., M.Si, Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkerlanjutan (TPB) Kehidupan Daratan Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-2019, 2022).

Penggunaan *The Sustainable Development* atau yang disingkat SDGs ini berangkat dari isu lingkungan yang dibawa oleh program kerja sama “*Heart of Borneo*” ini dan juga merupakan salah satu turunan dari Teori Hijau. SGD's merupakan agenda yang didirikan oleh PBB untuk pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan antara lain, (Katila, et al., 2020).

- a. Tidak ada kemiskinan (*no poverty*)
- b. Tidak ada kelaparan (*zero hunger*)
- c. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good health and well-being*)
- d. Pendidikan Berkualitas (*quality education*)
- e. Kesetaraan Gender (*gender equality*)
- f. Air Bersih dan Sanitasi (*clean water and sanitation*)
- g. Energi Bersih dan Terjangkau (*affordable and clean energy*)
- h. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*decent work and economic growth*)
- i. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry innovation and infrastructure*)



- j. Pengurangan Ketidaksetaraan (*reduced inequalities*)
- k. Kotadan Komunitas Berkelanjutan (*sustainable cities and communities*)
- l. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*responsible consumption and production*)
- m. Tindakan untuk Iklim (*climate action*)
- n. Kehidupan di Bawah Air (*life below water*)
- o. Kehidupan di Atas Darat (*life on land*)
- p. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (*peace, justice and strong institutions*)
- q. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*partner ships for the goals*)

SDGs membawa nilai – nilai yang membawa semua sektor mulai dari manusia, ekonomi, kesehatan, lingkungan yang secara bersama – sama negara anggota PBB berusaha untuk memecahkan masalah dari setiap sektor yang terjadi di setiap negaranya. Dalam Indonesia menunjukkan keseriusan terhadap agenda SDGs ini dan di tunjukan dengan terbentuknya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ditandatangani oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada tanggal 4 Juli 2017 (Najia & Triyatno , Analisis Teori Politik Hijau Terhadap Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kehidupan Darat Di Indonesia Studi Kasus : Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia 2016-1029, 2022). Nilai – nilai yang dipunya oleh tujuan pembangunan berkelanjutan ini mempunyai ikatan antara satu dengan yang lainnya. Di mana, nilai – nilai tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya namun tentunya mempunyai tujuan dan fokus tersendiri masing – masing.



Namun untuk penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian ini kepada nilai 15 yaitu *Life on Land* atau kehidupan didaratan. Yang di mana, konservasi hutan yang dilakukan oleh WWF, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam lewat program *Heart of Borneo* ini mempunyai goals dan tujuan yang sejalan. Walaupun seperti yang disebutkan sebelumnya, goals yang dipunyai oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain, setiap goals mempunyai fokus dan tujuan sendiri. Goals 15 dalam tujuan pembangunan berkelanjutan ini merupakan *Life on Land* dan bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghambat dan mengembalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Goals 15 juga mempunyai indikator – indikator untuk mencapai tujuannya antara lain memastikan bahwa konservasi, restorasi dan penggunaan yang khususnya hutan pegunungan dan daratan, sejalan dengan kewajiban dibawah perjanjian nasional dalam *Paris Agreement* dengan REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) (Laurensia, 2022). Penulis melihat fokus dan tujuan yang sama antara goals 15 dengan tujuan dari program kerja sama *Heart of Borneo* yang di mana kedua bertujuan dalam konservasi hutan, mengatasi ancaman kepunahan, dan menjadikan kawasan dari *Heart of Borneo* pada pembangunan berkelanjutan.

2.3 Lembaga Swadaya Masyarakat (Non – Governmental Organizations/ NGOs)

Organisasi internasional adalah pola kerja sama yang melintas batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas, lengkap, dan dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dan berguna untuk mengusahakan tercapainya tujuan – tujuan yang diperlukan serta disepakati sesama kelompok non – pemerintah pada negara yang berbeda. Organisasi internasional terbagi menjadi dua yaitu yang pertama, Organisasi



Pemerintah (*Governmental Organization/ IGOs*) dan yang kedua, Organisasi Non – Pemerintah (*Non – Governmental Organization/ NGOs*) dan anggota NGOs terdiri dari kelompok – kelompok di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi dan sebagainya (Sari, 2013).

Non – Governmental Organizations (NGOs) atau dalam bahasa Indonesianya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan lembaga atau organisasi non – pemerintah yang didirikan oleh sekelompok orang secara sukarela dan memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya (Praj, 2009). Menurut Budi Setyono, LSM atau *NGOs* merupakan lembaga atau organisasi non partisan berbasis pada gerakan moral yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik.

Istilah *Non – Governmental Organization* pertama kali diciptakan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tahun 1945 dan sejak saat itu pertumbuhan NGOs terus meningkat secara terus – menerus terutama diakibatkan oleh kegagalan pemerintah dan pasar, baik di negara maju maupun berkembang. Pada awalnya, NGOs di negara – negara industri maju di wilayah utara telah mampu menyalurkan dana dengan tujuan untuk mendanai proyek – proyek dalam dan luar negeri (Sama, 2015). NGOs mempunyai banyak jenis berdasarkan tujuannya, antara lain:

- a. NGOs Sosial: NGOs sosial ini berfokus kepada isu – isu sosial seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. NGOs Lingkungan: NGOs lingkungan pastinya berfokus pada lingkungan seperti iklim, deforestasi dan konversi satwa.
- c. NGOs Kemanusiaan: NGOs kemanusiaan ia berfokus pada kemanusiaan seperti halnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam, konflik atau krisis.



- d. NGOs Pembangunan Ekonomi: NGOs pembangunan ekonomi berfokus kepada meningkatkan kondisi ekonomi di komunitas yang kurang berkembang. Perkembangan yang mereka berikan melalui beberapa cara seperti program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil.
- e. NGOs Kesehatan: NGOs kesehatan berfokus kepada layanan kesehatan, penelitian medis, kampanye kesehatan dan lain – lain.
- f. NGOs Kebudayaan: NGOs kebudayaan ini berfokus pada budaya dan seni. Kebudayaan ini biasanya mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk menjaga budaya asli.
- g. NGOs Advokasi: NGOs advokasi ini berfokus pada mempengaruhi kebijakan publik melalui advokasi, kampanye dan lobi.
- h. NGOs Agama: Memiliki dasar atau tujuan yang berhubungan dengan agama biasanya berhubungan dengan program pekerjaan amal, pendidikan dan layanan sosial yang berdasarkan nilai agama.
- i. NGOs Pendukung Khusus: NGOs ini berfokus pada isu atau kelompok yang terkhusus, seperti hak perempuan, minoritas, anak – anak atau komunitas LGBTQ+.

NGOs mulai dikenal pada tahun 1846, dan yang tercatat sebagai NGOs pertama dalam berbagai literatur adalah *World's Evangelical Alliance* (Perhimpunan Penginjil Sedunia). Kemudian menyusul terbentuknya beberapa NGOs lainnya sejak pertengahan abad ke 19 (sekitar tahun 1860) dan beriringan dengan berkembangnya kerja sama internasional dalam bentuk organisasi – organisasi internasional antar pemerintah (Triwahyuni, 2010). NGOs dalam aktivitasnya berusaha mengembangkan, mengoperasikan dan bekerja sama satu sama lain dengan aktor lain di luar konteks



politik tradisional yang partisipatif. NGOs tidak mengumpulkan kekuasaan mereka dari kekerasan atau paksaan, tetapi dari hubungan mereka melalui jaringan transnasional, berbagi informasi, dan keahlian mengenai berbagai masalah yang membentang dari keamanan hingga HAM. NGOs merupakan aktor independen di kancah internasional dan dapat mendorong komunikasi dan mengumpulkan dukungan untuk memperjuangkan dan mewujudkan lingkungan hidup yang lestari. NGOs juga dalam aktivitasnya NGOs berusaha menginformasikan tentang pentingnya kondisi bumi melalui penelitian mereka sendiri sehingga masyarakat merespon ketika NGOs bertindak untuk melindungi lingkungan hidup. Dan salah satu NGOs lingkungan hidup yang memiliki peran besar di dunia dan dapat merubah respon negara serta perilaku NGOs lainnya adalah *Worldlife Fund for Nature* (WWF) (Sari, 2013).

Namun, kurangnya konsep NGOs ini terdapat pada terbatasnya keahlian keuangan dan manajemen, terbatasnya kapasitas kelembagaan, rendahnya tingkat kemandirian, dan kurangnya komunikasi antar – organisasi (Chairunnisa, 2018). NGO juga biasanya dianggap sebagai tantangan bagi kedaulatan negara karena NGOs sering bersebrangan dengan kebijakan pemerintah, namun tidak sedikit kehadiran NGOs sangat menguntungkan bagi negara atau pemerintah. Pada konsep NGOs yang digunakan untuk penelitian ini, penulis berfokus kepada NGOs Lingkungan, karena WWF merupakan organisasi internasional yang berfokus kepada deforestasi, satwa, dan isu lingkungan lainnya. Oleh karena itu, di sisi lain ruang gerak NGOs sebagai aktor harus dipisahkan dari isu kedaulatan, dan bahwa mereka mengadvokasi isu – isu global sebagai masalah yang menyangkut kemanusiaan. Dalam berbagai isu tersebut, negara tidak lagi menjadi aktor kunci yang hanya mau bekerja sama dengan antar negara – negara saja, tapi mereka juga bernegosiasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan NGOs (Sari, 2013).



4 Penelitian Terdahulu

Untuk bagian penelitian terdahulu, penulis mengambil dari 3 sumber penelitian antara lain, yang pertama berjudul “Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau” oleh Raditya. Yang kedua berjudul “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Program *Heart Of Borneo* (HOB) Di Indonesia Periode 2012 – 2013” oleh Siti Jamiatul Wardah. Dan yang ketiga berjudul “Advokasi *World Wide Fund (WWF)* Dalam Implementasi *Heart Of Borneo (Heart of Borneo)* Untuk Melestarikan Orangutan Di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001 – 2008” oleh Zuliya Kumalafuri.

Dalam sumber pertama yaitu berjudul “Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau” oleh Raditya dalam hasil penelitian ini Raditya menjelaskan bagaimana WWF dan Indonesia berupaya untuk menjaga satwa yang berada di hutan Provinsi Riau seperti Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini juga menjelaskan bagaimana usaha Advokasi WWF untuk mendapatkan kesepakatan dalam mengelola habitat gajah di TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) dengan Pemerintah Provinsi Riau dan mengeluarkan hasil dan kebijakan pemerintah. Raditya juga menjelaskan peran WWF dalam konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau yang dimana Indonesia mengesahkan *Convention on International Trade in Endangered of Flora dan Fauna* (CITES). Namun Indonesia dinggap belum memenuhi standar aturan nasional yang layak untuk digunakan untuk menunjang penerapan CITIES sehingga Indonesia sempat mendapat ancaman *total trade ban* dari sekretariat CITIES (Raditya, 2020). Pada penelitian ini juga menjelaskan usaha – usaha dari WWF untuk mempertahankan Gajah Sumatera ini melalui kerja sama internasional yaitu WWF Indonesia dengan pemerintah Indonesia lewat BBKSDA Riau terkait Gajah



Sumatera yang berlangsung pada tahun 2010 – 2013. Adapun kegiatan dari WWF Indonesia selaku bagian dari organisasi internasional dalam konservasi Gajah Sumatera antara lain Advokasi, Monitoring, penelitian, evaluasi dan upaya pengembangan ekowisata, Fasilitas komunikasi, Upaya pengembangan ekowisata. Adapun penghambat WWF dalam konservasi Gajah Sumatera di Taman Nasional Tesso Nilo Riau antara lain Faktor konflik dan perburuan, Faktor kebakaran hutan, Faktor lemahnya sinergitas, Faktor hambatan teknis dan non – teknis, dan yang terakhir Faktor lemahnya penegakan hukum (Raditya, 2020).

Perbedaan antara Penelitian “Peran World Wide Fund For Nature (WWF) Dalam Konservasi Gajah Sumatera Di Taman Nasional Tesso Nilo Riau” oleh Raditya ini dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut menjelaskan fungsi WWF, faktor penghambat dan juga menjelaskan Peran Indonesia dan WWF dalam melindungi Gajah Sumatera di Taman Nasional Nilo Riau. Sedangkan, penelitian ini menjelaskan Kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan WWF dalam Program “*Heart of Borneo*” di Hutan Mahulu, Kalimantan dan penelitian ini terbilang lebih general.

Untuk sumber penelitian terdahulu yang kedua berjudul “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Program *Heart Of Borneo* (HOB) Di Indonesia Periode 2012 – 2013” oleh Siti Jamiatul Wardah. Dalam penelitian ini Siti Jamaitul Wardah menjelaskan bahwa WWF merumuskan program yang khusus untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mengelola Program “*Heart of Borneo*” seperti pendanaan berkelanjutan, membantu pemerintah dalam mengembangkan kabupaten konservasi, membangun jaringan bisnis hijau, dan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui kerjasama dengan inisiatif lokal (Wardah, 2014). Peran WWF juga terlihat melalui programnya dalam jaringan bisnis hijau yaitu dengan menggunakan strategi *networking* dengan perusahaan kecil yang beroperasi di wilayah *Heart of Borneo*



(HoB). Juga selain itu, WWF melakukan strategi advokasi dan lobi, serta fungsi informasi dari organisasi internasional dengan menawarkan rekomendasi atau ide dengan tujuan agar para perusahaan dapat berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dengan menggunakan kaidah lestari yang sesuai dengan *sustainable development* (Wardah, 2014). Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran WWF dalam mengembangkan kapasitas masyarakat lokal dengan menggunakan strategi *training*, *monitoring*, *facilitating* dan adanya peran WWF tersebut menjadikan bukti bahwasanya masyarakat lokal, pemerintah, dan organisasi internasional adalah satu actor yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan di *Heart of Borneo* dengan tujuan menuju sinergi dimensi ekologi dan social, juga untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi sesuai dengan pilar *sustainable development* (Wardah, 2014).

Perbedaan penelitian berjudul “Peran *World Wide Fund For Nature* (WWF) Dalam Program *Heart Of Borneo* (HOB) Di Indonesia Periode 2012 – 2013” oleh Siti Jamiatul Wardah dengan penelitian ini adalah, Siti Jamiatul Wardah menjelaskan peran WWF dan Pemerintah Indonesia dalam program kerja sama *Heart of Borneo* dengan lebih general jika di bandingkan dengan penelitian ini yang difokuskan oleh kawasan wilayah *Heart of Borneo* yaitu Hutan Lindung Mahulu di Kalimantan.

Yang selanjutnya, sumber penelitian terdahulu dengan judul “Advokasi *World Wide Fund (WWF)* Dalam Implementasi *Heart Of Borneo (Heart of Borneo)* Untuk Melestarikan Orangutan Di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001 – 2008” oleh Zuliya Kumalafuri. Di mana penelitian ini membahas bagaimana advokasi WWF dalam implementasi *Heart of Borneo* untuk melestarikan Orangutan di Kalimantan Barat. Zuliya menjelaskan bahwa penyamaan persepsi dari WWF, Indonesia, Malaysia, dan Brunei terhadap pembukaan lahan kelapa sawit di Hutan



Kalimantan yang menyebabkan krisis satwa di hutan tersebut membuat WWF dan ketiga negara ini menyampaikan isu tersebut kepada masyarakat internasional dan mendatangi *Heart of Borneo* dan juga melihat bagaimana pasca pendatangannya *Heart of Borneo* untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya (Kumalafuri, Advokasi World Wild Fund (WWF) dalam Implementasi Heart of Borneo (HoB) Untuk Melestarikan Orangutan di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001-2008, 2023). Zuliya juga member data survey mengenai Orangutan pada tahun 2000 di mana terdapat 54.000 Orangutan di Kalimantan. Namun, pada 2004 estimasi Orangutan di Kalimantan mengalami penurunan sebanyak 14.700 sehingga diperkirakan akan punah dari tahun ke tahun yang akan datang (Kumalafuri, Advokasi World Wild Fund (WWF) dalam Implementasi Heart of Borneo (HoB) Untuk Melestarikan Orangutan di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001-2008, 2023). Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana WWF memfokuskan kegiatan advokasi mereka melalui asas, yaitu upaya yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mendeklarasi *Heart of Borneo* dan mempersiapkan strategi dalam melaksanakan advokasi dan inisiasi *Heart of Borneo* ini pertama kali di perkenalkan secara resmi pada 5 April 2005 hingga pendatangannya pada 12 Februari 2007 (Kumalafuri, Advokasi World Wild Fund (WWF) dalam Implementasi Heart of Borneo (HoB) Untuk Melestarikan Orangutan di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001-2008, 2023). Advokasi WWF dalam pelestarian Orangutan ini dapat dilakukan melalui kampanye dan program – program.

Perbedaan antara “Advokasi *World Wide Fund (WWF)* Dalam Implementasi *Heart Of Borneo (Heart of Borneo)* Untuk Melestarikan Orangutan Di Kalimantan Akibat Pembukaan Lahan Kelapa Sawit Tahun 2001 – 2008” oleh Zuliya Kumalafuri dengan penelitian ini adalah penelitian Zuliya menjelaskan program kerja sama *Heart*



of Borneo ini di Wilayah *Heart of Borneo* Kalimantan Barat dalam melestarikan Orangutan. Sedangkan, penelitian ini menjelaskan program kerja sama *Heart of Borneo* di wilayah Kalimantan Timur dalam melestarikan Hutan Lindung di Mahulu.